

**JURNAL**  
**IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO**  
**3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**OLEH DINAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Kasus TPA Klotok Kota Kediri)**



**OLEH :**  
**ADHITYA RISWANA**  
**0910113063**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2013**

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO  
3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
OLEH DINAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP**

(Studi Kasus TPA Klotok Kota Kediri)

**ABSTRAKSI**

Aditya Riswana, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas  
Brawijaya Malang, September 2013, “**IMPLEMENTASI PASAL 12  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 3 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS KEBERSIHAN  
LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus TPA Klotok Kota Kediri)**”, Prof.Dr.  
Sudarsono,S.H,M.S dan Agus Yulianto,S.H,MH.

*Kata Kunci:* Implementasi, Penertiban, Pencemaran Udara, TPA Klotok Kota Kediri

Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah permasalahan tentang yang Kasus pencemaran udara akibat pembuangan sampah di TPA klotok kota Kediri adalah permasalahan yang selama bertahun tahun belum ada penyelesaian dan sudah banyak warga yang bergejolak. Mereka mendesak Pemkot Kediri segera menutup tempat pembuangan akhir (TPA) di Klotok tersebut, karena sudah tidak tahan dengan polusi atau bau tak sedap akibat timbunan sampah yang cukup tinggi dan sebagian warga sering terserang penyakit diare hingga infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan penyakit lainnya. Demi tercapainya lingkungan yang baik,sehat,dan bersih tentunya diperlukan suatu perangkat peraturan yang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang baik,sehat,dan bersih serta diperlukannya pengawasan dan/atau pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu instansi yang berwenang yaitu Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup.

Sehingga penulis melakukan penelitian terhadap implementasi Pasal 12 Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup kota Kediri terkait kasus pencemaran udara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok kota Kediri dan hambatan

pelaksanaan pengendalian pencemaran udara oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Upaya untuk mengatasi Hambatan Tersebut.

Metode-metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 12 Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan dengan realita yang ada di lapangan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Implementasi pasal 12 perda kota Kediri nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup kota Kediri terkait kasus pencemaran udara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok kota Kediri kurang maksimal karena selama ini belum ada pengukuran Baku Mutu Udara Ambien di TPA Klotok, dan sudah ada kasus kematian 2 (dua) orang pemulung yang merupakan warga di sekitar TPA Klotok, selama ini pengelolaan sampah yang ada adalah dengan cara Composting.

## **LATAR BELAKANG MASALAH**

Kebersihan lingkungan hidup merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Masalah sampah merupakan suatu fenomena kehidupan manusia yang telah ada sejalan dengan proses interaksi manusia dengan alam dan lingkungan, hanya saja yang membedakanya yaitu baik kuantitas maupun kualitas dahulu lebih sedikit dan lebih sederhana dibandingkan dengan kondisi sekarang.

Lingkungan yang baik tentunya memiliki system pengelolaan sampah yang baik pula. Kota dengan system pengelolaan sampah yang tidak tepat akan mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat, dan lingkungan yang tidak sehat dapat mengganggu kehidupan masyarakatnya. Seperti halnya sampah yang menumpuk dapat memicu timbulnya wabah penyakit seperti penyakit kulit,diare, dan demam berdarah. Selain itu akibat yang ditimbulkan oleh system pengelolaan sampah yang tidak tepat adalah seperti bau tak sedap yang menyebabkan pencemaran udara.

Pencemaran udara kota di beberapa kota besar di Indonesia telah sangat memprihatinkan. Namun, jarang disadari banyaknya warga kota yang meninggal

setiap tahunnya karena infeksi saluran pernapasan, asma, maupun kanker paru-paru akibat polusi udara kota. Diperkirakan dalam sepuluh tahun mendatang terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit paru-paru dan saluran pernapasan. Bukan hanya infeksi saluran pernapasan akut, tetapi juga meningkatnya jumlah penderita penyakit asma dan kanker paru-paru.

Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Rusaknya atau semakin sempitnya lahan hijau atau pepohonan di suatu daerah juga dapat memperburuk kualitas udara. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara yang terjadi.

Pencemaran udara dapat terjadi dimana-mana, misalnya di dalam rumah, sekolah, dan kantor. Pencemaran ini sering disebut pencemaran dalam ruangan. Selain itu pencemaran di luar ruangan berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup serta timbunan sampah yang menyebabkan bau tak sedap.

Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara ada beberapa hal yang perlu dijadikan landasan yaitu meliputi:

- a. Penentuan status mutu udara
- b. Penyusunan data meteorologis dan geografis yang diperlukan dalam rangka pengendalian pencemaran udara
- c. Inventarisasi sumber pencemaran
- d. Penetapan baku mutu emisi, baku kebisingan dan baku kebauan
- e. Penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan limbah berwujud gas dan atau partikulat
- f. Penetapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud huruf e, termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara.

Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang bersihan lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

walikota melalui Sekertaris Daerah. Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebersihan lingkungan hidup.

Pengendalian yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan hidup sepenuhnya adalah tanggung jawab Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup. Salah satu pengendalian yang dimaksud adalah pembuangan sampah. Dalam teknis pembuangan sampah diperlukan adanya pengendalian lingkungan hidup terhadap setiap kegiatan yang dilakukannya yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan hidup.

Di kota Kediri banyak permasalahan mengenai lingkungan hidup terutama tempat pembuangan sampah, yang awalnya di rencanakan untuk pemilahan sampah rumah tangga di masing-masing kelurahan. Hingga sekarang banyak bank sampah yang tidak difungsikan bahkan rusak. Padahal jika difungsikan dengan benar dan dikelola secara serius, tempat pembuangan sampah itu akan bermanfaat bagi masyarakat di masing-masing kelurahan di kota itu sendiri. Sampai sekarang ini masih banyak tempat pembuangan sampah yang kondisinya sangat memprihatinkan, salah satunya adalah tempat pembuangan sampah di Klotok kota Kediri yang menimbulkan pencemaran udara yaitu bau tak sedap yang cukup menyengat, karena tempat pembuangan sampah tersebut dekat dengan pemukiman warga. Bahkan sudah banyak warga yang menjadi korban pencemaran udara tersebut yaitu banyak warga yang menderita penyakit pernafasan, asma, paru-paru, dll. Selain itu tempat pembuangan akhir di klotok kota Kediri ini volumenya sudah melebihi kapasitas yang hanya 3.000 meter kubik. Bahkan, sejak awal tahun lalu, ketinggian sampah sudah mencapai 15 meter. .Jika pada awalnya pagar pembatas hanya setinggi 3 meter, namun karena penumpukan terus menerus akhirnya pagar ditinggikan menjadi 10 meter.

Kasus pencemaran udara akibat pembuangan sampah di TPA klotok kota Kediri adalah permasalahan yang selama bertahun tahun belum ada penyelesaian dan sudah banyak warga yang bergejolak. Mereka mendesak Pemkot Kediri segera menutup tempat pembuangan akhir (TPA) di Klotok tersebut, karena sudah tidak tahan dengan polusi atau bau tak sedap akibat timbunan sampah yang cukup tinggi dan sebagian warga sering terserang penyakit diare hingga infeksi saluran

pernafasan atas (ISPA) dan penyakit lainnya. Oleh sebab itu, warga mendatangi Kelurahan Klotok dan meminta TPA segera ditutup. Karena warga tidak tahan dengan sampah yang mengakibatkan warga sering sakit. Bahkan pernah ada warga meninggal dunia yang diduga akibat menghirup bau sampah yang berlebihan dari TPA. Pada tahun 2009 warga juga sempat bergejolak dengan kasus yang sama namun mereda, karena ada kompensasi dari Pemkot yaitu berupa sembako yang nilainya mencapai Rp 200 juta.<sup>1</sup>

Demi tercapainya lingkungan yang baik,sehat,dan bersih tentunya diperlukan suatu perangkat peraturan yang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang baik,sehat,dan bersih serta diperlukannya pengawasan dan/atau pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu instansi yang berwenang yaitu Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup.

Maka dari itu dibentuk Peraturan daerah kota Kediri nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Terkait hal-hal yang diuraikan diatas, penulis ingin mengkaji tentang permasalahan kebersihan lingkungan hidup terkait kasus pencemaran udara TPA Klotok kota Kediri.Yang menjadi dasar penelitian penulis adalah Pasal 12 Perda Kota Kediri no 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi:

*“Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.”*

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka penulis mengambil judul:

## **IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

---

<sup>1</sup> Kasus TPA Klotok Kediri <http://www.google.com>, tanggal 10 Maret 2013

## **HIDUP OLEH DINAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus TPA Klotok Kota Kediri)**

### **PERMASALAHAN**

Dari latar belakang di atas ada tiga permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pasal 12 perda kota Kediri nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup kota Kediri terkait kasus pencemaran udara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok kota Kediri?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Kediri dalam mengatasi pencemaran udara TPA klotok Kota Kediri?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, metode pendekatan yuridis sosiologis, adalah untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum normatif yaitu Pasal 12 Perda Kota Kediri no 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan upaya Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup terutama dalam penertiban pencemaran udara di TPA Klotok. Dalam penelitian yang dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Klotok. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*

*sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan pada tujuan tertentu, dalam hal ini adalah:

- a. Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Kediri.
- b. Pegawai atau Staf Kantor Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Kediri yang bergerak di bidang pengawasan kebersihan lingkungan hidup.
- c. 3 Tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok Kota Kediri.

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Pasal 12 Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Kediri Terkait Kasus Pencemaran Udara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok Kota Kediri**

Menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri, persoalan timbunan sampah di TPA Klotok merupakan persoalan yang masih belum maksimal dalam mencari solusi permasalahannya, dari mulai TPA Klotok berdiri yaitu pada Tahun 1994 dan sampai sekarang telah berumur 21 tahun.<sup>2</sup>

Berbicara tentang implementasi Pasal 12 Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut penulis ada beberapa hal yang harus dianalisis berkaitan dengan masalah penertiban

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Juni 2013



pencemaran udara di TPA Klotok, hal-hal yang harus dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara di daerah, Pemerintah Pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup membuat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah. Di dalam huruf a konsideran Permen Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah dikatakan bahwa kualitas udara yang semakin menurun akibat peningkatan sumber pencemar udara oleh kegiatan manusia sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara. Pada huruf b konsideran Permen Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah diuraikan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengendalian pencemaran udara yang menjadi kewenangannya dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Permen Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah ini diadakan bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencemaran udara, hal tersebut termaktub di dalam Pasal 2.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah dikatakan bahwa

*“Bupati/walikota melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari:*

- a. sumber bergerak; dan*
- b. sumber tidak bergerak yang lokasi dan/atau dampaknya skala kabupaten/kota terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara.”*

Dilihat dari aturan ini jelas bahwa segala kegiatan dari sumber tidak bergerak yang dapat menimbulkan pencemaran udara harus dilakukan pengawasan oleh Bupati/Walikota dalam skub Kabupaten/Kota, sudah barang tentu ketika kita berbicara masalah TPA Klothok merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Kediri dalam pengendalian pencemaran udaranya. Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)<sup>3</sup> daerah menurut Pedoman Teknis Baku Mutu Udara Ambien Daerah dari Permen Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah, ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari BMUA nasional serta berdasarkan pertimbangan status mutu udara ambien di daerah yang bersangkutan.

Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan BMUA meliputi:

- a. Reseptor Sensitif
- b. Kelakuan Pollutant di atmosfir.
- c. Kelakuan Pollutan di lingkungan.
- d. Level natural dan fluktuasi, level konsentrasi dan fluktuasi pencemar yang terjadi secara alami atau masuk ke dalam atmosfir dari sumber pencemar yang tidak terkontrol atau sumber natural.

---

<sup>3</sup> Selanjutnya disebut BMUA

- e. Teknologi, biaya dan ketersediaan teknologi untuk mengontrol atau mengurangi emisi

Jika dilihat dari Asas kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka penentuan Baku Mutu Udara Ambien di TPA Klotok harus berlandaskan asas kehati-hatian yang mana ada kewajiban pemerintah untuk menentukan Baku Mutu Udara Ambien dikarenakan aktivitas TPA Klotok yang tak terduga bisa menyebabkan pencemaran udara dan mengganggu kesehatan di lingkungan sekitar sehingga harus ada upaya pencegahan yang dapat menyebabkan kelakuan pollutant mencemari udara disekitar lingkungan TPA Klotok.

- 2. Pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi TPA Klotok.

Seharusnya kalau ditinjau dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 TAHUN 2009 Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur ada pengukuran baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, namun justru yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan tidak adanya pengukuran Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 12 Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Padahal akibat pencemaran udara yang ada di TPA Klotok menimbulkan efek negatif terhadap penduduk sekitar TPA Klotok.

Dampak timbunan sampah berakibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar TPA Klotok, menurut Ketua RT 2 di TPA Klothok<sup>4</sup>, bau yang tidak sedap seringkali keluar dari timbunan sampah, apalagi kalau kondisi musim penghujan, bau itu sangat menyengat sekali seperti bau kotoran manusia. Dampak dari pencemaran udara yang diakibatkan aktivitas penimbunan sampah di TPA Klotok menurut Tokoh Masyarakat RT 3<sup>5</sup> menyebabkan 2 orang pemulung yang merupakan warga setempat meninggal dunia karena mengalami infeksi saluran pernafasan, lingkungan udara yang tidak sehat ini memang rentan terhadap masyarakat yang tinggal disekitar TPA Klotok, banyak anggota masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernafasan.

Bahkan menurut Ketua RT 4<sup>6</sup> ketika masyarakat pernah melaporkan terkait persoalan lingkungan termasuk pencemaran udara yang terjadi di TPA Klotok belum ada tanggapan dari pemerintah. Ditambahkan oleh Tokoh Masyarakat RT 3<sup>7</sup> bahwa selain masalah pencemaran udara yang terjadi TPA Klotok daya tampungnya sudah overload, dan sudah tidak layak. Tuntutan dari masyarakat adalah menutup TPA Klotok.

Ambang batas baku mutu udara sebenarnya sudah ditentukan di dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah. Ambang batas baku mutu udara bisa dilihat di dalam table di bawah ini:

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 2 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat RT 3 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 4 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat RT 3 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013

**Tabel BMUA Nasional**

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu
1.	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	1 Jam	900 ug/Nm <sup>3</sup>
		24 Jam	365 ug/Nm <sup>3</sup>
		1 Tahun	60 ug/Nm <sup>3</sup>
2.	Karbon Monoksida (CO)	1 Jam	40 ug/Nm <sup>3</sup>
		24 Jam	30 ug/Nm <sup>3</sup>
		1 Tahun	-
3.	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	1 Jam	400 ug/Nm <sup>3</sup>
		24 Jam	150 ug/Nm <sup>3</sup>
		1 Tahun	100 ug/Nm <sup>3</sup>
4.	Oksidan (O <sub>3</sub> )	1 Jam	235 ug/Nm <sup>3</sup>
		24 Jam	-
		1 Tahun	50 ug/Nm <sup>3</sup>
5.	Hidro Karbon (HC)	3Jam	160 ug/Nm <sup>3</sup>
6.	Partikulat < 10 um (PM <sub>10</sub> )	1 Jam	-
		24 Jam	150 ug/Nm <sup>3</sup>
		1 Tahun	-
	Partikulat < 2,5 um (PM <sub>2,5</sub> )	1 Jam	-
		24 Jam	66 ug/Nm <sup>3</sup>
		1 Tahun	15 ug/Nm <sup>3</sup>
7.	Debu (TSP)	1 Jam	-
		24 Jam	230 ug/Nm <sup>3</sup>
		1 Tahun	90 ug/Nm <sup>3</sup>
8.	Timah Hitam (Pb)	1 Jam	-
		24 Jam	2 ug/Nm <sup>3</sup>
		1 Tahun	1 ug/Nm <sup>3</sup>
9.	Dustfall (debu jatuh)	30 Hari	10 ton/km <sup>2</sup> /bulan (Pemukiman)

			20 ton/km <sup>2</sup> /bulan (Industri)
10.	Total Fluorides (sebagai F)	24 Jam	3 ug/Nm <sup>3</sup>
		90 Hari	0,5 ug/Nm <sup>3</sup>
11.	Fluor Indeks	30 Hari	40 ug/100 cm <sup>2</sup> dari kertas lime filter
12.	Klorin dan Klorin Dioksida	24 Jam	150 ug/Nm <sup>3</sup>
13.	Sulphat Indeks	30 Hari	1 mg SO <sub>2</sub> /100 cm <sup>2</sup> dari lead peroksida

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah

Dalam Pasal 5 PP. No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa daerah dapat menetapkan BMUA daerah berdasarkan status mutu udara ambien di daerah yang bersangkutan melalui keputusan gubernur. BMUA daerah ditetapkan sebagai batas maksimum kualitas udara ambien daerah yang diperbolehkan dan berlaku diseluruh wilayah udara di atas batas administrasi daerah, dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional. Jadi apabila aktivitas TPA Klotok dapat dikatakan mencemari udara di sekitar TPA tersebut, maka pengukurannya harus mengikuti Baku Mutu Udara Ambien tersebut di atas.

Penilaian AMDAL memang pernah dilakukan tetapi itu jauh sebelum TPA Klotok beroperasi, dan sampai hari ini belum ada penilaian AMDAL lagi di TPA Klotok. Bahkan hasil dari Penilaian AMDAL itu tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Kediri pada waktu itu. Namun kedepannya Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri akan mendatangkan laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi dalam satu tahun sekali untuk melakukan pengukuran mutu udara di TPA Klotok seperti yang

dilakukan pada Pengukuran Baku mutu udara untuk areal industri di Kota Kediri selama ini.<sup>8</sup>

Dilihat dari asas tanggung jawab Negara poin b yang diatur Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Negara menjamin hak warganegara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri yang hanya sekali saja melakukan penilaian AMDAL sehingga kemudian tidak ada penilaian AMDAL lagi dan terjadilah pencemaran udara maka hal ini menurut penulis ada kelalaian Pemerintah Kota Kediri yang menyebabkan Hak masyarakat disekitar TPA Klotok atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi tidak terpenuhi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga Negara.

3. Pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Selama ini pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Kediri menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kediri<sup>9</sup> adalah dengan diolah menjadi kompos/organik dan di daur ulang, proses sampah menjadi kompos dengan cara sampah organik dicacah dengan mesin pencacah kemudian diberi Bioaktivator untuk mempercepat proses pengomposan, kemudian setiap hari dilakukan pemeriksaan suhu dan kelembabannya, suhu berkisar 50°C-70°C, kemudian ditutup dengan menggunakan terpal selama 2-3 hari apabila terlalu

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Juni 2013

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Juni 2013

panas dibalik dan diberi bioaktivator lagi, setelah 2 minggu kompos diangin-anginkan. Namun tidak semua sampah dapat terangkut untuk dilakukan composting, apalagi volume sampah yang kian hari kian bertambah, sehingga ini menimbulkan bau yang tidak sedap disebabkan oleh gas metan yang keluar dari timbunan sampah. Dan selama ini tidak ada pengukuran udara di TPA Klothok.

Selama ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk melakukan pengurangan pencemaran udara di TPA Klotok adalah dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pengurangan sampah di TPA melalui composting dan daur ulang.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan sampah agar berdaya guna
3. Penambahan ruang terbuka hijau.

Namun hal ini disanggah oleh Ketua RT 2<sup>10</sup> bahwa jarang ada pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari Pihak Pemerintah Kota Kediri terkait dengan aktivitas TPA Klotok seperti yang diamanatkan oleh Perda Kota Kediri No. 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua RT 4<sup>11</sup> di TPA Klotok bahwa selama ini belum ada upaya maksimal dari Pemerintah Kota Kediri dalam mengurangi pencemaran udara yang timbul dari aktivitas TPA Klotok karena konsentrasi Pemerintah hanya pada program pemberian kompensasi dari pencemaran udara. Program pemberian kompensasi itu menurut Tokoh Masyarakat RT 3<sup>12</sup> dulu berupa pemberian beras

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 2 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 4 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat RT 3 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013



per Kepala Keluarga terdampak dan sekarang dirubah tidak lagi beras tetapi dengan pemberian uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- per 2 (dua) bulan sekali.

Persoalan Pencemaran Udara di TPA Klotok yang selama ini dirasakan oleh masyarakat sekitar menurut Tokoh Masyarakat RT 3 di TPA Klotok adalah gangguan dari bau yang tidak sedap dan gangguan pernafasan. Bahkan bau yang tidak sedap ini sampai menempel ke pakaian-pakaian yang di jemur, dan upaya pemerintah hanya melakukan penyemprotan, demikian ditambahkan oleh Ketua RT 2<sup>13</sup>.

Sudah seharusnya persoalan pencemaran udara di TPA Klotok menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang ada di Kota Kediri, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup saja, keterlibatan masyarakat juga perlu diaktifkan. Namun menurut Ketua RT 2<sup>14</sup> selama ini masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan TPA Klotok untuk mengurangi pencemaran udara bahkan masukan-masukan dari masyarakat tidak diindahkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Namun hal ini disanggah oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup bahwa selama ini masyarakat dilibatkan di dalam pengelolaan sampah di TPA Klotok dalam rangka mengurangi pencemaran udara yang ada yaitu dengan mengajak mereka dalam kegiatan memilah sampah, keterlibatan masyarakat selama ini dirasakan memang belum maksimal, sehingga kedepannya masyarakat akan lebih banyak dilibatkan oleh Pemerintah Kota Kediri.

Persoalan pengendalian pencemaran udara melalui tiga hal yang dilakukan oleh Kota Kediri menurut penulis sudah sesuai dengan asas keserasian dan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 2 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ketua RT 2 di TPA Klotok, tanggal 5 Juni 2013

keseimbangan karena ada kerja-kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk melakukan pemanfaatan lingkungan hidup dengan melakukan composting dan mendayagunakan sampah yang ada di TPA Klotok untuk sesuatu yang bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Kediri juga menerapkan Asas pencemar membayar dikarenakan Pemerintah Kota Kediri memberikan santunan kepada masyarakat disekitar TPA Klotok sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan aktivitas TPA Klotok yang menyebabkan pencemaran udara.

Jika dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, maka implementasi Pasal 12 Perda Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

#### 1) Kondisi Lingkungan

Apabila dilihat dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu faktor lingkungan, maka dikarenakan kegiatan TPA klotok yang dapat menyebabkan pencemaran udara dapat mempengaruhi kondisi sosio kultural lingkungan masyarakat di sekitar TPA Klotok maka harus ada kebijakan dari Pemerintah Kota Kediri untuk melakukan penentuan Baku Mutu Udara Ambien, sehingga ada upaya pencegahan Pencemaran Udara di TPA Klotok apabila dirasa Baku Mutu Udara Ambien tersebut sudah melampaui batas.

#### 2) Hubungan Antar Organisasi

Apabila dilihat dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis yaitu Faktor Hubungan Antar Organisasi, maka persoalan pengendalian pencemaran udara tidak hanya menjadi domain dari Pemerintah Kota Kediri melainkan juga merupakan kerja-kerja dari

Dinas Kehutanan untuk masalah pembangunan ruang terbuka hijau untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara. dalam pengelolaan kegiatan TPA kurang adanya koordinasi antara pihak yang satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap TPA klotok dan terjadi pencemaran udara di TPA Klotok. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya seperti contoh kurangnya keaktifan daftar hadir.

### 3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Apabila dilihat dari faktor sumberdaya organisasi untuk implementasi, sumber-sumber yang dilakukan kurang tersedia seperti kurangnya tanggung jawab yang dilakukan langsung oleh staff yang ada di dalam Kantor Lingkungan Hidup, untuk peralatan kurangnya armada truk pengangkut pengurangan sampah dan kurangnya pengembangan bank sampah di kota Kediri.

### 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Apabila dilihat dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program yaitu Faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, maka menurut penulis disini terlihat ketidak mampuan dari Pemerintah Kota Kediri untuk melakukan pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi TPA Klotok, sehingga menyebabkan pencemaran udara yang berakibat terhadap lingkungan yang tidak sehat dan tercemar serta banyaknya masyarakat yang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas)

## **Hambatan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup**

Hambatan-hambatan yang dialami di dalam pelaksanaan pengendalian Pencemaran udara oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Kediri menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup<sup>15</sup> adalah:

1. Keterbatasan Pengembangan Lokasi TPA Klotok

Daya tampung TPA Klotok yang sudah tidak memadai merupakan dampak dari keterbatasan pengembangan lokasi TPA Klotok, sehingga perlu dipikirkan cara lain untuk mengatasi timbunan sampah yang kian menggunung dan sudah tidak tertampung di TPA Klotok.

2. Sulitnya Pengembangan Bank Sampah

Bank sampah adalah sesuatu hal baru dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Kediri, sehingga masih banyak kesulitan dalam pengembangan Bank Sampah TPA Klotok. Apabila dilihat dari faktor sumberdaya organisasi untuk hambatannya, sumber-sumber yang dilakukan kurang tersedia seperti kurangnya tanggung jawab yang dilakukan langsung oleh staff yang ada di dalam Kantor Lingkungan Hidup, untuk peralatan kurangnya armada truk pengangkut pengurangan sampah dan kurangnya pengembangan bank sampah di kota Kediri.

3. Kurangnya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Persoalan pengendalian pencemaran udara tidak hanya menjadi domain dari Pemerintah Kota Kediri melainkan juga merupakan kerja-kerja dari Dinas Kehutanan untuk masalah pembangunan ruang terbuka hijau untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara. dalam pengelolaan kegiatan TPA kurang

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Juni 2013

adanya koordinasi antara pihak yang satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap TPA klotok dan terjadi pencemaran udara di TPA Klotok.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Kediri Dalam Mengatasi Pencemaran Udara TPA Klotok Kota Kediri**

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup<sup>16</sup> adalah:

#### **1. Keterbatasan Pengembangan Lokasi TPA Klotok**

Upaya dalam mengatasi hambatan Keterbatasan Pengembangan Lokasi TPA Klotok yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah dengan cara pengelolaan sampah menggunakan dengan cara Composting dan menjadikan sampah sebagai energi alternatif dengan cara menjadikan gas metan untuk bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari rumah tangga yaitu memasak dan kedepannya juga bisa digunakan untuk Pembangkit Tenaga Listrik, upaya selanjutnya yang masih terus dikembangkan adalah pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*). Pengurangan sampah dengan metoda 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, atau kawasan seperti RT ataupun RW. Dari pendekatan tersebut, maka didalam pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu:

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, tanggal 4 Juni 2013

- 1) Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat
- 2) Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metoda 3R.
- 3) Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi hambatan keterbatasan pengembangan lokasi TPA Klotok menurut penulis merupakan penerapan Asas manfaat dan juga asas Partisipatif karena proses pengelolaan sampah dengan metoda 3R merupakan bentuk pemanfaatan ditambah lagi proses partisipasi masyarakat untuk melakukan konsep 3R.

## 2. Sulitnya pengembangan Bank Sampah

Upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan bimbingan teknis terkait operasional dan Manajemen Bank Sampah kepada kader-kader sampah yang ada di tiap kelurahan, dan mendorong mereka untuk menjadikan sampah menjadi bernilai ekonomis. Sehingga ketika sampah sudah memiliki nilai ekonomis maka timbunan sampah menjadi berkurang dan dapat mensejahterkan masyarakat sekitar TPA Klotok dan tentu saja ketika timbunan sampah sudah berkurang dengan cara pemanfaatan sampah menjadi bernilai ekonomis pencemaran udarapun bisa berkurang. Karena dengan berkurangnya volume sampah sebagai sumber pencemaran udara yang ada di TPA Klotok berkurang pula pencemaran udara yang dapat ditimbulkan dari aktivitas TPA Klotok.

## 3. Kurangnya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

Upaya yang dilakukan adalah membuat biopori di perkampungan-perkampungan yang ada di Kota Kediri untuk mengurangi Sampah Organik yang masuk ke TPA Klotok dan untuk mengatasi kurangnya pembangunan ruang terbuka hijau.

## **KESIMPULAN**

Adapun dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 12 perda kota Kediri nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup kota Kediri terkait kasus pencemaran udara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok kota:
  - a. Apabila dilihat dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu faktor lingkungan, maka dikarenakan kegiatan TPA klotok yang dapat menyebabkan pencemaran udara dapat mempengaruhi kondisi sosio kultural lingkungan masyarakat di sekitar TPA Klotok maka harus ada kebijakan dari Pemerintah Kota Kediri untuk melakukan penentuan Baku Mutu Udara Ambien, sehingga ada upaya pencegahan Pencemaran Udara di TPA Klotok apabila dirasa Baku Mutu Udara Ambien tersebut sudah melampaui batas.
  - b. Apabila dilihat dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis yaitu Faktor Hubungan Antar Organisasi, maka persoalan pengendalian pencemaran udara tidak hanya menjadi domain dari Pemerintah Kota Kediri melainkan juga merupakan kerja-kerja dari

Dinas Kehutanan untuk masalah pembangunan ruang terbuka hijau untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara. dalam pengelolaan kegiatan TPA kurang adanya koordinasi antara pihak yang satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap TPA klotok dan terjadi pencemaran udara di TPA Klotok. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya seperti contoh kurangnya keaktifan daftar hadir.

- c. Apabila dilihat dari faktor sumberdaya organisasi untuk implementasi, sumber-sumber yang dilakukan kurang tersedia seperti kurangnya tanggung jawab yang dilakukan langsung oleh staff yang ada di dalam Kantor Lingkungan Hidup, untuk peralatan kurangnya armada truk pengangkut pengurangan sampah dan kurangnya pengembangan bank sampah di kota Kediri.
- d. Apabila dilihat dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program yaitu Faktor karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, maka menurut penulis disini terlihat ketidak mampuan dari Pemerintah Kota Kediri untuk melakukan pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara amibien disekitar lokasi TPA Klotok, sehingga menyebabkan pencemaran udara yang berakibat terhadap lingkungan yang tidak sehat dan tercemar serta banyaknya masyarakat yang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas).



2. Hambatan-hambatan yang dialami di dalam pelaksanaan pengendalian Pencemaran udara oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Kediri adalah:
  - a. Keterbatasan Pengembangan Lokasi TPA Klotok
  - b. Sulitnya pengembangan Bank Sampah
  - c. Kurangnya pembangunan ruang terbuka hijau
3. Upaya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, adalah sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan sampah menggunakan dengan cara Composting dan menjadikan sampah sebagai energi alternative dan pengelolaan sampah dengan menggunakan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) yang lebih menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, atau kawasan seperti RT ataupun RW.
  - b. Melakukan bimbingan teknis terkait operasional dan Manajemen Bank Sampah kepada kader-kader sampah yang ada di tiap kelurahan, dan mendorong mereka untuk menjadikan sampah menjadi bernilai ekonomis.
  - c. Membangun biopori di perkampungan-perkampungan untuk mengatasi sampah organik yang masuk ke TPA Klotok dan untuk mengatasi kurangnya ruang terbuka hijau.

## **SARAN**

Saran yang bisa penulis berikan dalam penulisan skripsi ini terkait dengan implementasi pasal 12 perda kota Kediri nomor 3 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup kota Kediri terkait kasus pencemaran udara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok kota Kediri adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Daerah yang khusus Pengelolaan Sampah di Kota Kediri yang nantinya menjadi acuan dalam mengatasi persoalan sampah dan pencemaran udara akibat aktivitas TPA Klotok
2. Perlu melibatkan masyarakat mulai dari Tahap perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan di dalam Pengelolaan Sampah TPA Klotok.
3. Perlu belajar lagi kepada Kota-kota lain yang sudah berhasil menerapkan Bank Sampah dan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui sampah.